

BAB I

PENDAHULUAN

*“Kemiskinan adalah keadaan dimana kita sudah saling tidak memedulikan”
-penulis-*

1.1. Latar Belakang

Akankah pemberantasan kemiskinan di Indonesia dapat terjadi? Apakah hal itu merupakan visi realistis ataukah hanya menjadi visi utopis? Terlalu dini memang untuk menilai sejauh mana usaha yang sudah dilakukan selama ini tidak, belum, atau telah berhasil mengentaskan kemiskinan. Menarik untuk dicermati, bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir jumlah angka kemiskinan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan terus mengalami penurunan. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin 37,17 juta atau 16.58%. Pada tahun 2008 menjadi 34,96 juta atau 15.42%. Lalu pada tahun 2009 turun menjadi 32,53 juta atau 14.15%. Dan semakin menurun pada tahun 2010, angka kemiskinan berada pada angka 31,02 juta atau 13.33%. Secara lebih ringkas dan jelas terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia tahun 2007-2010

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2007	13.559.3	23.609.0	37 168.3	12.52	20.37	16.58
2008	12.768.5	22.194.8	34 963.3	11.65	18.93	15.42
2009	11 910.5	20 619.4	32 530.0	10.72	17.35	14.15

2010	11097.8	19925.6	31023.4	9.87	16.56	13.33
------	---------	---------	---------	------	-------	-------

Sumber: data resmi BPS

Menurunnya angka kemiskinan dapat dilihat sebagai salah satu indikator positif akan perkembangan Indonesia dalam memerangi kemiskinan. Akan tetapi dengan begitu bukan berarti usaha untuk memberantas kemiskinan telah sukses dan berhasil. Khususnya di Surabaya sendiri, berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Surabaya tahun 2011, jumlah keluarga miskin (gakin) tercatat masih sebanyak 112.465 kepala keluarga (KK) atau sekitar 449.860 jiwa (estimasi 1 KK empat jiwa). Walaupun Tingkat kemiskinan di Surabaya sudah mengalami penurunan hingga 7% selama tahun 2010. Namun besaran penurunan itu berapa, Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini enggan mengungkap angka detailnya. "Saya tidak mau bicara soal angka. Yang pasti, prosentase penurunannya mencapai hingga 7 persen untuk tahun 2010 ini," tandas Risma (Rismaharini, 2011).

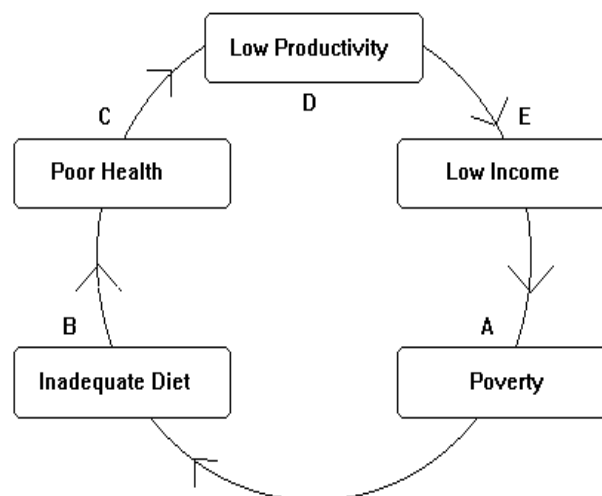
Menanggapi penurunan kemiskinan tersebut, Prof. Suahasil Nazara, Ph.D, Guru Besar FE UI dalam seminar 3 FE UI, juga mengemukakan "Adanya data bahwa dalam kurun waktu 2006-2010, angka kemiskinan terus menurun namun masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang memiliki pendapatan Rp 225.000/kapita/bulan" (Nazara, 2011). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perang melawan kemiskinan adalah proses yang harus terus berkelanjutan dan tidak boleh berhenti.

Begitu banyak hambatan dalam memberantas kemiskinan, antara lain kurang terkontrolnya faktor-faktor penyebab kemiskinan. Menurut Tulus (2003), kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1). Tingkat

pendidikan yang rendah (2). Produktivitas tenaga kerja rendah (3). tingkat upah yang rendah (4). distribusi pendapatan yang timpang (5). kesempatan kerja yang kurang (6). Kualitas sumberdaya alam masih rendah (7). penggunaan teknologi masih kurang (8). etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah (9). kultur/budaya (tradisi) (10). politik yang belum stabil. Kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan lingkaran setan (*vicious circle*) dalam masalah timbulnya kemiskinan (Tulus, 2003).

Gambar 1.1.

The vicious circle of poverty - Individual level (Barke & O'Hare, 1991)



Seperti gambar di atas, dapat dilihat bahwa salah satu kontributor dalam kemiskinan individu adalah rendahnya pendapatan (*low-income*). Di Indonesia standar tingkat pendapatan minimal rata-rata yang dipakai BPS untuk perhitungan garis kemiskinan 2010 di Indonesia sebesar Rp211.726 per bulan atau sekitar

Rp7.000 per hari. Sementara banyak negara lain sudah menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia sebesar US\$2 atau sekitar Rp18.000 per hari.

Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tentu akan memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut nampak dalam kekurangmampuan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan kapabilitas finansial mereka, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Selain keterbatasan secara finansial orang-orang miskin juga memiliki ketidakberdayaan secara psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Parker dan Kleiner (dalam Arbiyah dkk, 2008) menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup dalam kemiskinan lebih cenderung merasa pesimis terhadap kemungkinan mereka untuk dapat berhasil. Rasa pesimis menunjukkan adanya pemaknaan yang negatif terhadap kehidupan. Padahal, ketidakberdayaan sendiri tidak selalu harus menyebabkan munculnya pemaknaan hidup yang negatif.

Hal inilah yang coba dilihat dalam psikologi positif, yang berupaya untuk melihat sisi positif sosok manusia. Pemrakarsa psikologi positif, Seligman (2005), melihat bahwa ditengah ketidakberdayaannya, manusia selalu memiliki kesempatan untuk melihat hidup secara lebih positif. Manusia dipandang sebagai makhluk yang bisa bangkit dari segala ketidakberdayaan dan memaksimalkan potensi diri. Psikologi positif melihat manusia sebagai sosok yang mampu menentukan cara memandang kehidupan. Psikologi positif berpusat pada pemaknaan hidup, bagaimana manusia memaknai segala hal yang terjadi dalam dirinya, dimana pemaknaan ini bersifat sangat subjektif. Untuk itulah, pemaknaan hidup yang positif merupakan hal yang sangat penting agar manusia, dengan

berbagai latar belakangnya, dengan berbagai subjektivitas yang dimilikinya, bisa meraih kebahagiaan atau disebut dengan istilah kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*). (Arbiyah dkk, 2008)

Kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) didefinisikan sebagai penilaian kognitif dan afektif seseorang atas hidupnya. Penilaian ini mencakup reaksi emosional terhadap berbagai peristiwa atau kejadian yang dialami sebagaimana reaksi kognitif orang tersebut atas kepuasan dan pemenuhan hidup. Oleh karena itu Kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) adalah konsep besar yang meliputi pengalaman emosi bahagia, kecenderungan suasana hati yang positif, dan kepuasan hidup yang tinggi. Pengalaman-pengalaman positif tersebut tergabung didalam tingkat kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) yang tinggi, dimana merupakan akar dari konsep psikologi positif yang lebih menghargai kehidupan. (Diener, 2000).

Banyak studi yang telah dilakukan menemukan adanya korelasi positif antara kemiskinan dengan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) yang dimiliki (Diener dkk, 1992). Veenhoven (dalam Diener dkk, 1992) menyebutkan individu yang memiliki pendapatan lebih besar akan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, keamanan, kesehatan, tempat tinggal, mereka cenderung lebih mudah memiliki kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*). Dan individu yang berpendapatan lebih rendah terkadang dikaitkan dengan psikopatologi (Horwitz dalam Diener dkk, 1992).

Pada individu dengan pendapatan lebih besar memiliki skor kesejahteraan (*well-being*) yang lebih tinggi dan lebih merasa bahagia daripada individu dengan

pendapatan rendah. Dalam skala lebih luas pun juga menunjukkan hal yang sama, kemiskinan dan hubungannya dengan skor kesejahteraan (*well-being*) berkorelasi dalam konteks negara. Korelasi tersebut juga meliputi antar gender, tingkat pendidikan, dan kelompok etnis. Bagaimanapun juga, penurunan kemiskinan, baik secara individual maupun nasional akan memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) (Diener dkk, 1992).

Dalam penelitian yang dilakukan Biswas Diener dan Ed Diener mengenai kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) pada masyarakat di lingkungan miskin di Calcutta, India diperoleh hasil bahwa aspek kognitif yang mewakili kepuasan hidup memiliki skor yang relatif positif pada masyarakat di lingkungan miskin tersebut. Hal tersebut dimungkinkan karena responden menemukan kepuasan hidup dalam hal yang lebih spesifik daripada sumber-sumber material. Di samping itu aspek kognitif kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) memiliki skor yang sedikit positif. Perbedaan skor kedua aspek tersebut dapat dikarenakan skala afeksi memiliki jangkauan waktu yang lebih sempit, dan lebih sensitif terhadap kejadian sehari-sehari yang mempengaruhi emosi, seperti kunjungan teman ataupun mengalami hari buruk dalam pekerjaan, dimana munculnya berbagai kejadian itu tidak dapat dipastikan dan tidak selalu terjadi (Diener & Diener, 2001).

Seperti yang telah disebutkan diatas, kemiskinan tersebut juga mencakup keadaan sosial-demografis seperti lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi kesejahteraan (*well-being*) seseorang. Individu-individu yang tinggal di area lebih kaya memiliki skor kesejahteraan (*well-being*) yang lebih tinggi daripada

individu-individu di area yang lebih miskin (Diener dkk, 1992). Saraccino (2010), menunjukkan bahwa hubungan sosial berhubungan dengan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) individu. Lebih lanjut, Harlow dan Cantor (dalam Diener, 2000) menemukan juga partisipasi sosial merupakan prediktor kuat untuk kepuasan hidup pada orang tua yang telah pensiun. Orang tua tersebut lebih merasa lebih bermakna dengan adanya keterlibatan sosial dan kegiatan yang terarah.

Salah satu aspek dari hubungan sosial seseorang yang memiliki konsekuensi dengan kesejahteraan (*well-being*) adalah rasa komunitas (*sense of community*) (Jorgensen dkk, 2010). Dalam sebuah studi di kota kecil dan di desa kecil, Prezza dkk (dalam Jorgensen dkk, 2010) melaporkan terdapat hubungan yang signifikan antara rasa komunitas (*sense of community*) dan kepuasan hidup.

Melalui studi literatur yang dilakukan dalam beberapa penelitian, rasa komunitas (*sense of community*) didefinisikan sebagai sebagai *sense of belonging* seseorang terhadap lingkungan dan komunitas masyarakat dimana ia tinggal. Pengertian tersebut mencakup berbagai hal termasuk diantaranya kepuasan terhadap lingkungan tempat tinggal, rasa memiliki suatu lingkungan dan komunitas, serta pengenalan dan keterikatan secara fisik dan emosional terhadap komunitas dalam lingkungan yang diwujudkan antara lain dalam interaksi sosial yang baik dan keterlibatan dalam komunitas (Lund, 2002).

Menurut Mcmillan dan Chavis (1986), ada 4 dimensi atau elemen penting dari rasa komunitas (*sense of community*). Dimensi pertama adalah *membership*, bagaimana perasaan individu dimana dirinya menjadi bagian dari sebuah

komunitas dan memiliki keterikatan dengan komunitas tersebut. Kedua adalah *influence*, mengacu pada kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk mempengaruhi anggota lain dan kekuatan komunitas untuk mempengaruhi individu, sebuah hubungan vertikal timbal balik yang terus menerus. Berikutnya adalah *integration and fulfillment of needs*, yang lebih menekankan pada hubungan horizontal antara anggota dari komunitas. Serta yang terakhir adalah *shared emotional connection*, dimana adanya ikatan spiritual didasarkan pada sejarah atau pengalaman bersama yang dimiliki oleh anggota dalam komunitas, serta proses-proses penguatan ikatan tersebut yang melibatkan kesamaan nilai dan sejarah.

Dari dimensi itu dapat dimengerti rasa komunitas (*sense of community*) adalah sebuah perasaan dimana anggota mempunyai rasa memiliki dan terikat, rasa dimana antara anggota berarti bagi satu sama lain dan bagi grup/kelompok, dan serta berbagi keyakinan bahwa kebutuhan komunitas anggota akan saling terlengkapi melalui komitmen untuk tetap bersama. (McMillan & Chavis, 1986)

Dilihat dari pengertiannya, maka seperti halnya *well-being*, rasa komunitas (*sense of community*) juga dipengaruhi oleh faktor sosial-demografis. Lund (2002) mengungkapkan rasa komunitas (*sense of community*) juga dipengaruhi oleh faktor personal dan sosial-demografis, misalnya faktor individu seperti usia, tingkat pendidikan, ekonomi dan faktor lingkungan.

Pada Kecamatan wonokromo yang menjadi lokasi penelitian ini, memiliki luas wilayah 8,47 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 146.875 jiwa, serta memiliki kepadatan penduduk sebanyak 15.844 Jiwa/Km². Ditinjau dari segi

sosio-ekonomi, letaknya yang di tengah kota, menjadikan Wonokromo sebagai jalur utama lalu lintas Kota Surabaya. Sehingga Wonokromo memiliki potensi yang sangat besar. Baik potensi ekonomi dan perdagangan, maupun potensi sosial dan budaya serta sumber daya manusia.

Meski begitu, mengacu pada data yang dipublikasikan oleh BPS, jumlah keluarga miskin di kecamatan wonokromo mencapai 5.866 KK. Dari RW 9 Kelurahan Sawunggaling yang termasuk dalam wilayah Kecamatan wonokromo juga tercatat sebanyak 75 kepala keluarga yang terdaftar sebagai penerima BLT. Adapun bentuk kerawanan kelurahan Sawunggaling yang bisa dijadikan sebagai catatan oleh peneliti adalah: (1). Banjir (2). Macet (3). Laka Lantas (4). Miras (5). Unras (6). Curas (7). Curat (8). Curanmor (9). Perjudian (10). Kebakaran objek vital.

Brodsky A, dkk (1999) mengatakan bahwa lingkungan miskin perkotaan biasanya dipandang memiliki sistem komunitas yang lemah. Lingkungan masyarakat dengan pendapatan rendah juga dipandang tidak sehat dan tidak nyaman dan tidak memberikan perlindungan. Brodsky mencontohkan, bahwa ditemukan beberapa ibu sebagai orangtua tunggal yang secara *resilient* hidup di lingkungan berpendapatan rendah dan berbahaya, memiliki rasa komunitas (*sense of community*) yang negatif sebagai sebuah bentuk proteksi. Ibu-ibu itu memandang akan sangat beresiko ketika melibatkan diri dan terikat di dalam komunitas, dan menganggap penarikan diri dari komunitas adalah sebuah bentuk strategi protektif untuk keluarga dan dirinya. (Brodsky, 1996 dalam Brodsky dkk, 1999).

Chavis dan Newbrough (dalam Brodsky dkk, 1999) menjelaskan bahwa sistem komunitas yang sehat adalah yang dapat menahan adanya masalah-masalah sosial, psikologikal, dan bisa memaksimalkan potensi lingkungan, individu dan kolektifitas masyarakat. Sistem komunitas juga bergantung pada individu-individu yang tinggal didalamnya, kualitas dan kepuasan hidup anggota komunitas juga bergantung pada kekuatan sistem komunitas tersebut.

Berdasarkan studi awal peneliti yang juga bertempat tinggal di kawasan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat kelurahan Sawunggaling terutama wilayah RW 9 memiliki karakteristik yang cukup kolektif. Hal tersebut terlihat ketika ada kegiatan yang melibatkan seluruh warga, misalnya, peringatan hari kemerdekaan, kematian seorang warga, dan perayaan hari raya. Meskipun begitu, masyarakat setempat nampak kurang dalam hal produktifitas karena memang secara ekonomi banyak bergantung pada institusi swasta dan hasil alam setempat. Sehingga jika tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersosialisasi.

Tetapi Brodsky juga mengatakan bahwa tidak pada semua lingkungan yang miskin, tidak sehat dan tidak aman, berlaku strategi *coping* yang menarik diri. Di lingkungan individu-individu yang berpendapatan rendah juga menunjukkan rasa komunitas (*sense of community*) yang bervariasi. Individu bisa menilai bagaimana sebuah komunitas yang hanya memberikan penguatan atau hubungan timbal balik yang lebih kecil atau tidak sepadan hanya akan lebih menguras energi dan beresiko yang lebih besar. Dari riset sebelumnya juga ditemukan jika sebuah komunitas memiliki ikatan yang sehat, akan mempunyai

rasa komunitas (*sense of community*) yang positif. Hal ini tercermin dalam penelitian Diener pada masyarakat miskin di Calcutta bahwa kepuasan hidup responden cukup dipengaruhi oleh hubungan sosial (teman, keluarga, hubungan romantis).

Berangkat dengan penjelasan di atas, dapat dipahami jika kemiskinan tidak selalu akan menjadi penyebab utama buruknya sistem komunitas masyarakat yang bisa menimbulkan rasa komunitas (*sense of community*) negatif pada seseorang. Kemiskinan juga tidak menjadi penentu tinggi rendahnya skor kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) seseorang. Menurut Lane (dalam Jorgensen dkk, 2010), hubungan sosial memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kesejahteraan (*well-being*) individu daripada tingkat pendapatan.

Cummin (dalam Jorgensen dkk, 2010) dengan teori homestasis kesejahteraan (*well-being*) menyebutkan, diluar jumlah pendapatan, kesejahteraan (*well-being*) secara lebih luas dipengaruhi oleh proses psikologikal dan faktor-faktor eksternal (hubungan sosial yang suportif) yang beroperasi untuk mengatur kesejahteraan (*well-being*) dalam batas-batas dan fungsi tertentu. Bahkan Sarason (1974) mempercayai bahwa rasa komunitas (*sense of community*) adalah aspek penting untuk kualitas hidup dan kesejahteraan (*well-being*) seseorang. Faktor kemiskinan inilah yang mengarahkan penulis untuk kemudian menjadikannya sebagai konteks penelitian dalam mencari hubungan antara rasa komunitas (*sense of community*) dengan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) pada masyarakat miskin.

1.2. Identifikasi masalah

Individu yang hidup dalam kemiskinan tentu akan memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut nampak dalam kekurangmampuan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan kapabilitas finansial mereka, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Selain keterbatasan secara finansial orang-orang miskin juga memiliki ketidakberdayaan secara psikologis.

Veenhoven (dalam Diener dkk, 1992) menyebutkan individu yang memiliki pendapatan lebih besar akan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, keamanan, kesehatan, tempat tinggal, mereka cenderung lebih mudah memiliki kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*).

Kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) didefinisikan sebagai penilaian kognitif dan afektif seseorang atas hidupnya. Penilaian ini mencakup reaksi emosional terhadap berbagai peristiwa atau kejadian yang dialami sebagaimana reaksi kognitif orang tersebut atas kepuasan dan pemenuhan hidup.

Dalam penelitian yang dilakukan Biswas Diener dan Ed Diener mengenai kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) pada masyarakat di lingkungan miskin di Calcutta, India diperoleh hasil bahwa aspek kognitif yang mewakili kepuasan hidup memiliki skor yang relatif positif pada masyarakat di lingkungan miskin tersebut. Hal tersebut dimungkinkan karena responden menemukan kepuasan hidup dalam hal yang lebih spesifik daripada sumber-sumber material. Di samping itu aspek kognitif kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) memiliki skor yang sedikit positif. Perbedaan skor kedua aspek tersebut dapat dikarenakan skala afeksi memiliki jangkauan waktu yang lebih sempit, dan lebih

sensitif terhadap kejadian sehari-sehari yang mempengaruhi emosi, seperti kunjungan teman ataupun mengalami hari buruk dalam pekerjaan, dimana munculnya berbagai kejadian itu tidak dapat dipastikan dan tidak selalu terjadi (Diener & Diener, 2001).

Seperti yang disebutkan di atas, kemiskinan tersebut juga mencakup keadaan sosial-demografis seperti lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi kesejahteraan (*well-being*) seseorang. Individu-individu yang tinggal di area lebih kaya memiliki skor kesejahteraan (*well-being*) yang lebih tinggi daripada individu-individu di area yang lebih miskin (Diener dkk, 1992). Saraccino (2010), menunjukkan bahwa hubungan sosial berhubungan dengan SWB individu.

Salah satu aspek dari hubungan sosial seseorang yang memiliki konsekuensi dengan kesejahteraan (*well-being*) adalah rasa komunitas (*sense of community*) (Jorgensen dkk, 2010). Dalam sebuah studi di kota kecil dan di desa kecil, Prezza dkk (dalam Jorgensen dkk, 2010) melaporkan terdapat hubungan yang signifikan antara rasa komunitas (*sense of community*) dan kepuasan hidup. Harlow dan Cantor (dalam Diener, 2000) menemukan juga partisipasi sosial merupakan prediktor kuat untuk kepuasan hidup pada orang tua yang telah pensiun. Orang tua tersebut lebih merasa lebih bermakna dengan adanya keterlibatan sosial dan kegiatan yang terarah.

Brodsky A, dkk (1999) mengatakan bahwa lingkungan miskin perkotaan biasanya dipandang memiliki sistem komunitas yang lemah. Lingkungan masyarakat miskin juga dipandang tidak sehat dan tidak nyaman serta beresiko dan tidak memberikan perlindungan. Tetapi tidak pada semua lingkungan yang

buruk akan menimbulkan penarikan diri dan rasa komunitas (*sense of community*) negatif pada individu.

Di lingkungan individu-individu yang hidup dalam kemiskinan juga menunjukkan rasa komunitas (*sense of community*) yang bervariasi. Hal ini dikarenakan individu bisa menilai bagaimana sebuah komunitas yang hanya memberikan penguatan atau hubungan timbal balik yang lebih kecil atau tidak sepadan hanya akan lebih menguras energi dan beresiko yang lebih besar. Dari riset sebelumnya juga ditemukan jika sebuah komunitas memiliki ikatan yang sehat, akan mempunyai rasa komunitas (*sense of community*) yang positif.

Sarason (1974) mempercayai bahwa rasa komunitas (*sense of community*) adalah aspek penting untuk kualitas hidup dan kesejahteraan (*well-being*) seseorang. Pentingnya rasa komunitas (*sense of community*) yang positif pada kesejahteraan (*well-being*) pada masyarakat miskin, mendorong penulis untuk meneliti hubungan antara rasa komunitas (*sense of community*) dengan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) pada masyarakat miskin.

1.3. Batasan masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan antara rasa komunitas (*sense of community*) dengan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) pada masyarakat miskin. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) adalah penilaian kognitif dan afektif seseorang atas hidupnya. Penilaian ini mencakup reaksi

emosional terhadap berbagai peristiwa atau kejadian yang dialami sebagaimana reaksi kognitif orang tersebut atas kepuasan dan pemenuhan hidup. Oleh karena itu kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) adalah konsep besar yang meliputi pengalaman emosi bahagia, kecenderungan suasana hati yang positif, dan kepuasan hidup yang tinggi. Pengalaman-pengalaman positif tersebut tergabung didalam tingkat kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) yang tinggi (Diener 2000).

2. Kemiskinan, mengacu standar tingkat pendapatan minimal rata-rata yang dipakai BPS untuk perhitungan garis kemiskinan 2010 di Indonesia sebesar Rp211.726 per bulan atau sekitar Rp7.000 per hari atau menurut standar bank dunia sebesar Rp US\$ 2 atau Rp 18.000/hari, serta masyarakat penerima BLT dan raskin.
3. Rasa komunitas (*sense of community*) adalah perasaan dimana anggota mempunyai rasa memiliki dan terikat, rasa dimana antara anggota berarti bagi satu sama lain dan bagi grup/kelompok, dan serta berbagi keyakinan bahwa kebutuhan komunitas anggota akan saling terlengkapi melalui komitmen untuk tetap bersama. (McMillan & Chavis, 1986)

1.4. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah ada hubungan antara rasa komunitas (*sense of community*) dengan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) pada masyarakat miskin?

1.5. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara rasa komunitas (*sense of community*) dengan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) pada masyarakat miskin.

1.6. Manfaat penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini:

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Serta dapat memperkaya kajian dan wawasan dalam psikologi sosial dan psikologi positif, khususnya mengenai rasa komunitas (*sense of community*) dan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) bagi akademisi ataupun siapa saja yang tertarik pada isu penelitian ini.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini:

1. Memberikan referensi untuk pengambilan kebijakan mengenai pemukiman yang secara komunitas, sehat, aman, tenteram, dan dapat mengembangkan kesejahteraan (*well-being*) individu.
2. Memberikan referensi bagi para psikolog komunitas atau pegiat pemberdayaan komunitas lainnya dalam menyusun pendekatan guna mengembangkan komunitas.